



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERANAN KEJAKSAAN DALAM MENYELENGGARAKAN KEGIATAN DI MASA
PANDEMI UNTUK PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
BERDASARKAN PASAL 30 AYAT (3) HURUF A UNDANG-UNDANG
NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK
INDONESIA DI KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

M RIZKY MAULANA

NIM. 11720714702

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

1442/2021



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul ***“Peranan Kejaksaan Dalam Menyelenggarakan Kegiatan di Masa Pandemi Untuk Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Berdasarkan Pasal 30 ayat 3 huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pelalawan”*** yang ditulis oleh:

Nama : M RIZKY MAULANA

NIM : 11720714702

Program Studi : ILMU HUKUM

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru; 3 Mei 2021

Pembimbing Skripsi

MHD. KASTULANI, S.H., M.H
NIP. 196309091992021001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta Milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul *"PERANAN KEJAKSAAN DALAM MENYELENGGARAKAN KEGIATAN DI MASA PANDEMI UNTUK PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT BERDASARKAN PASAL 30 AYAT (3) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DI KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN"* yang ditulis oleh :

Nama : **M RIZKY MAULANA**
 NIM : 11720714702
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 09 Juni 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring/Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juni 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH.

Sekretaris
Rudiadi, SH., MH

Penguji I
Muslim, S.Ag, SH, M.Hum.

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH., MH

.....



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag

NIP. 19580712 198603 1 005



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

M. Rizky Maulana, (2020):

Peranan Kejaksaan Dalam Menyelenggarakan Kegiatan Di Masa Pandemi Untuk Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Huruf A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pelalawan.

Banyak masyarakat masih bermacam macam mengartikan tentang apa itu hukum, oleh karena itu haruslah ada yang nama nya penyuluhan hukum kepada masyarakat agar masyarakat tau apa hukum itu sebenarnya dan masyarakat bias lebih hati-hati dalam melakukan sesuatu agar tidak berurusan dengan hukum. Maka dari itu sudah seharusnya tugas dari Kejaksaan yang telah di amanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 ayat (3) huruf a.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peranan kejaksaan dalam dalam menyelenggarakan kegiatan di masa pandemi untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pelalawan dan apa saja kendala-kendala yang menghambat peranan Kejaksaan dalam menyelenggarakan kegiatan di masa pandemi untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat

Penelitian ini ialah penelitian hukum sosiologis, penelitian yang dilakukan dengan mengadakan indentifikasi pelaksanaan hukum dan bagaimana efektivitas hukum ini berlaku di masyarakat. Responden dalam penelitian ini yaitu Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan, Kepala Seksi Intelijen, Kepala Sub Bagian Intelijen, dan Jaksa di bidang Intelijen, maka penulis mengambil sampel dengan teknik *Purposive Sampling*. Penelitian ini merupakan penelitian yang dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa peranan kejaksaan dalam menyelenggarakan kegiatan di masa pandemi untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat kenyataan masih belum berjalan dengan optimal hal dan Tolak ukur berhasil atau tidaknya kegiatan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pelalawan dapat dilihat dari jumlah tindak pidana yang terjadi dan jumlah perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Pelalawan.

Adapun kendala-kendala yang menghambat diantaranya sebagai berikut; a). Faktor adanya covid 19, b). Terkendalanya jaringan ketika kegiatan secara online, c). Terbatasnya waktu untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan d). Stigma masyarakat terhadap kejaksaan.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. Tuhan semesta alam yang telah memberikan nikmat yang tidak terkira dan tidak terhingga, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan oleh penulis dengan judul **“Peranan Kejaksaan Dalam Menyelenggarakan Kegiatan Di Masa Pandemi Untuk Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Di Kejaksaan Negeri Pelalawan”**. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad saw, semoga kita mendapatkan syafa'at beliau di yaumil akhir kelak. *Aamiin*.

Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapatkan beberapa hambatan serta kesulitan, berupa kesibukan penulis sendiri dalam organisasi dan bekerja sehingga waktu dan fokus penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terbagi-bagi serta hambatan kecil lainnya yang tidak terduga.

Dalam penulisan skripsi ini juga, penulis telah banyak mendapatkan dukungan berupa materil maupun moril, serta arahan berupa peetunjuk dan bimbingan sehingga skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulus nya kepada :

1. Ayahanda tercinta Aminurrizal dan Ibunda tercinta Eliana yang telah mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang serta selalu memberikan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini, terima kasih atas do'a restu dan ridha nya.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajaranya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Bapak Dr. Drs, Hajar, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya yang telah melayani keperluan mahasiswa menjadi sarjana yang baik.
4. Bapak Firdaus, S.H., M.H. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang selalu memberikan motivasi dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak Moh. Kastulani, S.H., M.H. Selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan petunjuk kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak Dr. H. Helmi Basri, Lc., MA. Selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah banyak memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama penulis menimba ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan Ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
8. Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan, Kepala Seksi Intelijen, Kepala Subseksi bidang Ideologi, Politik, Pertahanan, Keamanan, Sosial. Budaya dan Kemasyarakatan, Jaksa dan seluruh Jajaran Pada Kejaksaan Negeri Pelalawan yang sudah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada teman-teman Ilmu Hukum E, Kawan-kawan di Kabinet Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum, dan teman-teman seangkatan 2017 yang tidak bisa disebutkan nama nya satu persatu, yang telah memberikan doa, bantuan, dan dukungan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Kepada Caca Sasmi Okta Prayati yang telah banyak membantu penulis di dalam penulisan skripsi, mulai dari membantu penulis menemukan gagasan untuk menentukan topik penelitian sampai skripsi ini di ACC oleh dosen Pembimbing.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semoga bantuan, dukungan, arahan, petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis tersebut menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyajian skripsi ini, kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk perbaikan tulisan ilmiah penulis yang akan datang.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 2 Mei 2021

Penulis

M. RIZKY MAULANA

NIM. 11720714702

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutipkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR BAGAN.....	viii
 BAB I	
PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Metode Penelitian.....	13
F. Sistematika Penulisan.....	19
 BAB II	
GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Sejarah Kejaksaan Negeri Pelalawan.....	22
B. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Pelalawan	25
C. Kode Etik Kejaksaaan	26
D. Makna Logo	30
E. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Pelalawan.....	32
 BAB III	
TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Peranan	33
B. Teori Sistem Hukum	37
C. Konsep Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat	40



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

D. Teori Kesadaran Hukum	46
--------------------------------	----

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Peranan Kejaksaan dalam menyelenggarakan kegiatan di masa pandemi untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pelalawan	54
B. Kendala-kendala yang menghambat peranan Kejaksaan dalam menyelenggarakan kegiatan di masa pandemi untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pelalawan.....	64

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran.....	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Populasi dan Sampel.....	16
Tabel IV.1	Laporan triwulan bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Pelalawan tentang kegiatan yang dilakukan di masa pandemi	62
Tabel IV.2	Perkara yang masuk di Kejaksaan Negeri Pelalawan Periode Januari – Desember 2020	63

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR BAGAN

Bagan II.1	Struktur organisasi Kejaksaan Negeri Pelalawan	32
------------	--	----





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 dalam penjelasan umumnya menyatakan secara tegas, bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada hukum (*Rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).¹ Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, hukum mendapatkan tempat yang paling tinggi serta terhormat. Dalam artian bahwa hukum adalah landasan normatif untuk urusan dan aktivitas kehidupan, baik dalam urusan kemasyarakatan, kebangsaan, dan juga urusan kenegaraan yang diakui secara formal maupun secara material, dengan demikian ada kewajiban bagi siapapun yang ada di kawasan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini untuk mematuhi hukum.

Dengan konsep Negara hukum, maka mengikatnya aturan hukum terhadap segenap warga masyarakat tanpa terkecuali para penguasa di Negeri ini adalah dalam rangka untuk tercapainya fungsi kontrol sosial dari hukum dalam rangka mewujudkan ketertiban, keadilan, dan ketentraman masyarakat, serta dalam rangka fungsi hukum untuk perubahan kehidupan sosial agar lebih berkualitas, lebih maju dan sejahtera, melalui dinamika pembangunan yang terarah,

¹ Majda El-Muhtaj, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: Kencana, Cet. Ke-3, 2009), h. 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

komprehensif dan berkesinambungan. Kemanfaatan dari fungsi hukum ini tentunya harus dapat dirasakan oleh setiap warga masyarakat tanpa terkecuali.

Dengan ditegakannya kaidah atau norma hukum yang selain dapat memberikan kenyamanan berupa perlindungan dan petunjuk bagi masyarakat, disisi lain hukumpun dapat juga berakibat penderitaan bagi yang terkena sanksi akibat dilanggarnya aturan hukum. Sanksi hukum ini dapat berupa sanksi perdata, sanksi administrasi, dan dapat berupa sanksi pidana. Sanksi hukum adalah sanksi fundamental yang walaupun bentuk kongkritnya dalam bentuk yang menyakitkan dan atau mematikan, harus ditegakan demi wibawa hukum dan kedaulatan Negara. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa setiap warga Negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.² Karenanya terhadap siapapun yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku. Masalahnya, bahwa dengan sanksi hukum yang demikian fundamental tersebut tentunya jangan sampai ada orang atau warga masyarakat yang terkena sanksi hukum tanpa sebelumnya mengetahui akan segala akibat dan risiko berupa sanksi dari melakukan suatu perbuatan pelanggaran hukum tersebut.

Suatu hal yang perlu dicermati, bahwa warga masyarakat sampai saat ini masih beraneka ragam dalam memberi arti dan mempersepsikan hukum, dan ada kecendrungan untuk tersesat kepada pemahaman yang sempit atau keliru tentang

² Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum. dengan kekeliruan dalam pemahaman hukum dapat berpengaruh terhadap penghargaan dan kepatuhan terhadap hukum. Keadaan seperti ini menandakan bahwa kesadaran hukum di masyarakat amat masih kurang.³ Dalam melakukan kesadaran hukum di dalam masyarakat sendiri di perlukan penyuluhan hukum guna mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi di masyarakat. Penyuluhan tersebut harus dimantapkan, sehingga tiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga Negara masyarakat dalam rangka tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.⁴

Hukum memiliki tujuan yang mulia untuk membentuk masyarakat berada dalam tatanan hukum. Hukum secara Sosiologis adalah penting dan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan (*Social Institution*) yang merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia. Hukum sebagai suatu lembaga kemasyarakatan, hidup berdampingan dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya dan saling pengaruh mempengaruhi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan tadi. Untuk mengetahui hukum yang berlaku, sebaiknya seorang sosiologi harus menganalisis gejala-gejala hukum di dalam masyarakat secara langsung, dia harus langsung meneliti proses-proses peradilan, konsepsi-konsepsi hukum yang berlaku dalam

³ Djoko Prakoso, *Tugas-tugas Kejaksaan Dibidang Non Yustisial*, (Jakarta : Bina Aksara, 1989), h. 165.

⁴ Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), h. 13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

masyarakat (misalnya, tentang keadilan), efektivitas dari hukum sebagai sarana pengendalian sosial, serta hubungan antara hukum dengan perubahan-perubahan sosial dan lain-lainnya.⁵ Hukum dapat memberikan suatu tujuan, oleh sebab itu penting mempelajari hukum.⁶ Masyarakat dan ketertibannya merupakan dua hal yang berhubungan sangat erat, bahkan bisa juga dikatakan dua sisi dari satu mata uang. Hukum yang merupakan sistem peraturan tidak akan tertib jika tidak ada dukungan dari masyarakat.

Menurunnya tingkat kesadaran hukum pada masyarakat merupakan gejala perubahan di dalam masyarakat, yaitu perubahan sosial. Menurut Soerjono Soekanto perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam suatu masyarakat dapat terjadi oleh karena bermacam-macam sebab. Sebab-sebab tersebut dapat berasal dari masyarakat itu sendiri (sebab-sebab intern) maupun dari luar masyarakat tersebut (sebab-sebab ekstern). Agar tercipta kesadaran hukum masyarakat, maka hukum harus dikomunikasikan kepada masyarakat luas.

Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan Hak Asasi Manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenanganya. Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan

h.17 ⁵ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994),

⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2014), h. 10

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁷

Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakan kewibawaan Pemerintah dan Negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Secara umum, tugas dan wewenang kejaksaan di atur dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang menentukan bahwa:⁸

- 1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat

⁷ Djoko Prakoso. *Op.Cit*, h. 166.

⁸ Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum di limpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik
- 2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
- a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan
 - d. Pengawasan kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama
 - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal

Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana yang diamanatkan pada Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran Kejaksaan Republik Indonesia mulai dari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

tingkat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Pada tingkat Kejaksaan Agung, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilaksanakan oleh Jaksa Agung Muda (JAM) Bidang Intelijen, kemudian pada tingkat Kejaksaan Tinggi dilaksanakan oleh Asisten Intelijen dan untuk tingkat Kejaksaan Negeri dilaksanakan oleh Seksi Intelijen.

Dalam rangka peningkatan kesadaran hukum masyarakat, kegiatan pembinaan budaya hukum diantaranya adalah dengan penyuluhan hukum, yang sasaran utamanya adalah peningkatan citra warga masyarakat terhadap hukum. secara formal keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum dapat diidentifikasi dengan diterbitkannya berbagai peraturan hukum yang menjadi landasan operasional kegiatan penyuluhan hukum. seperti dikeluarkannya Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-015/JA/3/1995 tanggal 22 maret 1995 tentang Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum (Binmatkum) yang kemudian di perbarui dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-001/A/JA/01/2006 tanggal 2 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Penerangan dan Penyuluhan Hukum.⁹

Sesuai dengan fokus penelitian ini yang dilakukan di Kejaksaan Negeri Pelalawan, maka penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat dilaksanakan oleh Seksi Intelijen. Dalam pelaksanaan tugas,

⁹ Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-015/JA/3/1995 tanggal 22 Maret 1995 tentang Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum sebagaimana yang di ubah dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-001/JA/01/2006 tanggal 2 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Penerangan dan Penyuluhan Hukum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wewenang dan fungsi di bidang ketertiban dan ketentraman umum, Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pelalawan membuat Rencana Strategis (Renstra) selama 5 (lima) tahun. Salah satu Rencana Strategis (Renstra) Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pelalawan adalah melakukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan pelanggaran hukum dengan cara melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dan penerangan hukum. Sasaran dari Rencana Strategi (Renstra) Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pelalawan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum adalah terciptanya masyarakat yang sadar dan tertib hukum.

Penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang dilaksanakan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pelalawan berupa penyuluhan hukum dan penerangan hukum. Penyuluhan hukum dan penerangan hukum dilakukan dengan cara bertatap muka secara langsung antara penyuluh hukum dan yang disuluh (Masyarakat). Perbedaan antara penyuluhan hukum dan penerangan hukum terletak pada sasaran yang dituju, dimana Penerangan Hukum adalah suatu kegiatan penyampaian materi hukum / materi perundang-undangan secara terencana dan terorganisir, yang umumnya dilaksanakan terhadap aparatur negara, organisasi masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat, mahasiswa, pelajar dan lain-lain yang berada di perkotaan atau masyarakat berpendidikan tinggi agar lebih mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

penyuluhan hukum dilakukan pada umumnya kegiatan penyampaian materi hukum / materi perundang-undangan secara terencana dan terorganisir, yang pada umumnya dilaksanakan terhadap masyarakat pedesaan (terpencil/terisolir), petani, buruh, nelayan atau masyarakat berpendidikan rendah agar mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Materi kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat yang dilakukan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pelalawan berupa penyuluhan atau sosialisasi terhadap produk hukum dan atau peraturan perundang-undangan yang tergolong masih baru. Namun dalam kenyataannya, penyelenggaraan kegiatan peningkatan kesadaran hukum yang di arahkan untuk menumbuhkembangkan serta meningkatkan kesadaran hukum bagi masyarakat yang dilaksanakan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pelalawan masih mengalami berbagai kendala, sehingga peranan Kejaksaan masih belum maksimal dalam menyelenggarakan kegiatan peningkatan kegiatan kesadaran hukum masyarakat.

Salah satu kendala yang dihadapi adalah Kejaksaan Negeri Pelalawan harus mengadakan segala kegiatan dengan melalui jaringan daring atau sistem online dikarenakan dunia saat ini termasuk khusus nya daerah Indonesia sedang mengalami keadaan bencana non alam yaitu mewabah nya virus Corona. Segala aktivitas Kegiatan baik penerangan hukum dan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Kejaksaan Negeri Pelalawan khusus nya melalui sistem online

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

di masa pandemi ini, salah satunya seperti penyuluhan Hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Pelalawan yaitu Program Jaksa Masuk Sekolah (JMS). Program ini merupakan salah satu kegiatan di kejaksaan yang mana merupakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat kepada siswa-siswa di sekolah. Dan juga dalam Penerangan hukum yang biasa nya di lakukan oleh Kejaksaan yaitu penerangan hukum terkait kegiatan Jaga desa dan sosialisasi ke desa-desa yang ada di Kabupaten Pelalawan harus di lakukan secara online dan juga bertemu di kantor Kejaksaan dengan jumlah yang dibatasi.

Dalam melaksanakan Kegiatan Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di masa pandemi ini, tidak menyeluruhnya kegiatan untuk bisa di lakukan dikarenakan terkedala oleh pandemi covid-19, dan untuk menggantikan kegiatan tersebut yang seharusnya turun langsung ke masyarakat harus di gantikan dengan sitem online dan pembatasan jumlah untuk datang langsung ke Kantor Kejaksaan Negeri Pelalawan. Hal ini yang membuat kegiatan di bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Pelalawan tidak berjalan dengan optimal.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut penulis tertarik dan akan mengkaji secara ilmiah dalam bentuk penulisan hukum/skripsi dengan Judul **“Peranan Kejaksaan Dalam Menyelenggarakan Kegiatan Di Masa Pandemi Untuk Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Huruf A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pelalawan”**.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dan untuk lebih terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap permasalahan ini, maka pembahasan dalam tulisan ini di fokuskan kepada Peranan Kejaksaan dalam menyelenggarakan kegiatan di masa pandemi untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pelalawan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan Kejaksaan dalam menyelenggarakan kegiatan di masa pandemi untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pelalawan ?
2. Apa saja kendala-kendala yang menghambat peranan Kejaksaan dalam menyelenggarakan kegiatan di masa pandemi untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pelalawan ?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana peranan Kejaksaan dalam menyelenggarakan kegiatan di masa pandemi untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pelalawan.
- b. Untuk Mengetahui apa saja kendala-kendala yang menghambat peranan Kejaksaan dalam menyelenggarakan kegiatan di masa pandemi untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pelalawan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini yaitu:

- a. Secara Teoritis
 - 1) Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai peranan kejaksaan dalam menyelenggarakan kegiatan di masa pandemi untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan pasal 30 ayat (3) Undang-

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pelalawan.

- 2) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Secara Praktis

Dapat memberikan data serta informasi mengenai peranan kejaksaan dalam menyelenggarakan kegiatan di masa pandemi untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan pasal 30 ayat (3) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pelalawan.

c. Secara Akademis

Kegunaan akademis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.

E. Metode Penelitian

Metode berasal dari bahasa Yunani: *methodos* yang berarti cara atau jalan.

Jadi metode merupakan jalan yang berkaitan dengan cara kerja dalam mencapai sasaran yang diperlukan bagi penggunaannya, sehingga dapat memahami objek sasaran yang dikehendaki dalam upaya mencapai sasaran atau tujuan pemecahan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan.¹⁰ Penelitian adalah terjemahan dari Bahasa Inggris *research* yang berarti usaha atau pekerjaan untuk mencari kembali yang dilakukan dengan suatu metode tertentu dengan cara hati-hati, sistematis, serta sempurna terhadap permasalahan. Sehingga dapat digunakan untuk menyelesaikan atau menjawab problem.¹¹ Metode penelitian merupakan suatu cara atau jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.

1. Jenis dan sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis yang artinya penelitian yang langsung mengumpulkan data ke lokasi penelitian terhadap penerapan aturan hukum kepada masyarakat.¹² Dalam hal ini literatur-literatur yang digunakan adalah literatur-literatur yang ada kaitannya dengan penelitian ini, salah satunya Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sedangkan sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu menggambarkan gejala dan fakta,¹³ yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian deskriptif ini juga memiliki tujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan gejala, kelompok

¹⁰ Joko Subagyo, *Metode penelitian dalam teori dan praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, jilid 1, 2011), h.1.

¹¹ *Ibid*, h. 2

¹² Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008), h.96.

¹³ *Ibid*, h. 57

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu untuk menemukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.¹⁴

2. Lokasi Penelitian

Sesuai permasalahan yang di temukan, penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Pelalawan. Adapun alasan penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi tempat penelitian penulis karena berdasarkan pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, kejaksaan dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum turut menyelenggarakan kegiatan yang mana salah satunya peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Selain itu lokasi tersebut sangat mudah dijangkau oleh penulis untuk melakukan observasi dan wawancara mengenai peranan kejaksaan dalam menyelenggarakan kegiatan di masa pandemi untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di kejaksaan negeri pelalawan.

3. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa yang mempunyai ciri-ciri yang sama.

¹⁴ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang di tentukan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.¹⁵

b. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari objek yang merupakan sumber data untuk penelitian.¹⁶ Adapun metode yang diambil adalah *purposive sampling* yaitu pengambilan disesuaikan dengan tujuan penelitian, sampel yang diambil hanya sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka yang menjadi populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah :

Tabel I.1
Populasi Dan Sampel

No	Jenis Populasi	Jumlah Populasi	Jumlah Sampel	Persentase %
1	Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan	1 Orang	1 Orang	100%
2	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pelalawan	1 Orang	1 orang	100%
3	Kasubsi di bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Pelalawan	1 Orang	1 Orang	100%
4	Jaksa di Bidang Intelijen Kejaksaan Negeri Pelalawan	1 Orang	1 Orang	100%

¹⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 98

¹⁶ Abdurrahman Fathoni, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2011), h. 23

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Jenis dan Sumber Data

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian dimaksud.¹⁷

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari pihak Kejaksaan baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya. Adapun dalam hal ini peneliti mewawancarai pihak-pihak terkait.
- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan, dan merupakan data yang sudah diolah.
- c. Data Tersier adalah data yang diperoleh dari ensiklopedia dan yang sejenisnya yang berfungsi untuk mendukung data primer dan sekunder seperti kamus besar bahasa Indonesia, artikel-artikel, majalah hukum, jurnal, dan sebagainya.

5. Metode Pengumpulan Data

- a. Observasi, adalah aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi

¹⁷ Amiruddin dan Zainar Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dibutuhkan atau melanjutkan suatu penelitian.¹⁸ Yakni dengan melakukan pengamatan langsung pada tempat penelitian.

- b. Wawancara, merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi dengan mengajukan pertanyaan kepada responden yang mengetahui permasalahan yang akan diteliti.¹⁹
- c. Studi kepustakaan, yaitu peneliti mencari data atau informasi melalui jurnal, buku-buku referensi, yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mencari data sekunder guna mendukung data primer.

6. Analisis Data

Setelah data tersusun secara sistematis, maka tahap selanjutnya adalah menganalisis. Analisis data dilakukan secara sistematis, kualitatif, komprehensif dan lengkap. Analisa secara sistematis dalam penelitian ini menjalankan sesuai dengan konsep sehingga dapat memberikan jawaban. Analisis kualitatif dalam penelitian menjabarkan secara bermutu dalam kalimat yang teratur sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman. Komprehensif artinya pembahasan secara bermutu dalam kalimat yang teratur sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman. Komprehensif artinya pembahasan data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif, yaitu dengan

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007), h. 24

¹⁹ *Ibid*, h. 24



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

cara menjelaskan dan menerangkan data dalam bentuk kalimat-kalimat yang disusun dengan pokok bahasan, tujuan dan konsep yang berkaitan dengan hal tersebut secara sistematis, kemudian dilakukan bahasan analisis kesimpulanya sebagai jawaban atas pokok bahasan yang dikemukakan dalam penelitian atau dengan kata lain yakni proses penyusunan, mengategorikan data kualitatif, mencari pola atau tema dengan maksud memahami makna nya.²⁰ Dari hasil penelitian yang penulis lakukan yaitu data yang diperoleh dari wawancara diolah dengan cara mengelompokkan dan memilih menurut jenisnya. Data atau bahan yang bersifat kualitatif dalam bentuk uraian kalimat yang jelas dan rinci sesuai dengan masalah pokok. Selanjutnya data dibahas dengan cara membandingkan dengan teori dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan penelitian ini, lalu di tarik suatu kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus yang lazim disebut metode deduktif.²¹

F . Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, penulis membagi sistematis penulis dalam lima (5) bab, masing-masing bab diuraikan dengan sub bab, sehingga antara bab satu dengan bab yang lain merupakan satu sistem dan memiliki ketertarikan satu sama lain. Untuk lebih jelasnya penulis menguraikan satu perasatu bab tersebut.

²⁰ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 78

²¹ Bambang Sunggono, *Op.Cit*, h. 45



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisikan latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini akan menguraikan tinjauan umum lokasi penelitian.

BAB III : KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi tentang pemaparan pengertian-pengertian, dan teori-teori hukum yang akan di pakai dalam menganalisa permasalahan yang dibahas sehubungan dengan masalah yang diteliti.

BAB IV : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi penyajian data dan hasil penelitian tentang peranan Kejaksaan dalam menyelenggarakan kegiatan di masa pandemi untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan Pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pelalawan dan kendala-kendala yang menghambat peranan Kejaksaan dalam menyelenggarakan kegiatan di masa pandemi untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan Pasal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

30 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pelalawan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan menguraikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.





BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Kejaksaan Negeri Pelalawan

Kejaksaan Negeri Pelalawan terbentuk pada tahun 2002 yang mana bermula dinamakan dengan Kejaksaan Negeri Pangkalan Kerinci dan di ganti dengan Kejaksaan Negeri Pelalawan pada tahun 2016, beralamat di Jalan Hangtuh No. 03 Desa Makmur SP. VI Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan. Kejaksaan Negeri Pelalawan merupakan suatu lembaga pemerintah yang berfungsi melakukan penuntutan suatu tindakan kejahatan dalam wilayah hukum Kabupaten Pelalawan baik tindak Pidana Umum maupun tindak Pidana Korupsi serta perkara Perdata dan Tata Usaha Negara dengan kata lain Jaksa Peengacara Negara. Kejaksaan Negeri Pelalawan dipimpin oleh seorang Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari).

Berikut adalah nama-nama Pimpinan Kejaksaan Negeri Pelalawan dari tahun 2002 sampai sekarang :

1. Muchidin, S.H. (2002-2004)
2. N. Edyansyah, S.H. (2004-2007)
3. Agus Trihandoko, S.H. (2007-2009)
4. Isrofi, S.H., MH. (2009-2012)
5. Edy Guswar, S.H., M.H. (2012-2014)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

6. Adnan, S.H. (2014-2017)
7. Tetty Syam, S.H., M.H. (2017-2019)
8. Nophy Tennophero Suoth, S.H., M.H. (2019-Sekarang).²²

Kejaksaan Negeri Pelalawan mempunyai kedudukan penting dalam hal penuntutan, penyelidikan, penyidikan sehingga dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “*Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang*”.

Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara, mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana. Disamping sebagai penyandang, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksanaan putusan pidana. Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan Republik Indonesia sebagai lembaga Negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara di bidang Penuntutan.

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaann Republik Indonesia juga mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana diatur di dalam pasal 30, yaitu :

²² Profil Kejaksaan Negeri Pelalawan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Di bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Melakukan penuntutan;
 - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
 - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang;
 - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik;
2. Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah.
3. Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
 - a. Peningkata kesadaran hukum masyarakat;
 - b. Pengamanan kebijakan penegakan hukum;
 - c. Pengawasan peredaran barang cetakan;
 - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan Negara;
 - e. Pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

B. Visi dan Misi Kejaksaan Negeri Pelalawan

1. Visi

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, transparan, akuntabel, untuk memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan.²³

2. Misi

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proporsional dan bermartabat melalui penerapan standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.
- b. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.

²³ Peraturan Jaksa Agung No: 011/A/JA/01/2010 tentang Rencana Strategis Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010-2014 tanggal 28 Januari 2010.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
- d. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan sumber daya manusia, Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.
- e. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral, dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

C. Kode Etik Kejaksaan

Tri Krama Adhyaksa kode etik ini merupakan pedoman atau petunjuk dalam menjalankan tugasnya sehari-hari. Menurut Liliana Tedjosaputro, “Tri Krama Adhyaksa” adalah landasan jiwa dari setiap warga Adhyaksa dalam meraih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

cita-cita luhurnya, terpatrit dalam “Trapsila” yang di sebut “Tri Krama Adhyaksa” yang meliputi tiga karma, yaitu Satya, Adhy, Wicaksana. Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai Tiga Krama tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

Satya, adalah kesetian yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa , terhadap diri sendiri pribadi dan keluarga maupun terhadap sesama manusia. Hal ini diartikan juga jujur terhadap tugas, yakni bahwa setiap warga Kejaksaan apa pun pangkat atau jabatan yang dimiliki, wajib menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dengan baik dan tidak berkhianat.

Kesemuanya itu mencerminkan sikap berpegang teguh pada kebenaran dan keadilan yang dibuktikan dengan menjauhkan diri dari noda atau hal-hal lain yang dapat merugikan keberhasilan tugas-tugas Kejaksaan.²⁴

Adhy, adalah kesempurnaan dalam bertugas yang berunsur utama pada kemilikan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia. Hal ini berarti bahwa setiap warga Kejaksaan dalam melakukan semua perbuatan, baik dalam maupun di luar dinas selalu dilandasi dengan alasan-alasan yang benar sehingga perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya.

Wicaksana, adalah berarti bijaksana dalam tutur kata dan perilaku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangan. Hal ini berarti bahwa

²⁴ Supriadi, *Etika dan tanggung Jawab Profesi hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 132



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

setiap warga Kejaksaan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Hal ini berarti bahwa setiap warga Kejaksaan dalam menunaikan tugas dharma bhaktinya, di samping harus cakap, mampu dan terampil, harus pula membuktikan dirinya sebagai petugas yang matang dan dewasa dengan tanpa mengorbankan prinsip dan ketegasan, dapat bertindak bijaksana.

Lebih lanjut Liliana Tedjosaputro mengatakan bahwa untuk mencapai keberhasilan Kejaksaan dalam Dharma Bhaktinya, diperlukan pemisahan perbidangan, adapun perbidangannya sebagai berikut :

1. Bidang Pembinaan

Bidang pembinaan secara umum berfungsi pada bagian kepegawaian guna mengatur, serta penertiban administrasi kepegawaian dan melakukan pembenahan terhadap Kantor Kejaksaan Negeri Pelalawan.

2. Bidang Intelijen

Bidang intelijen berfungsi melakukan tahap penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana tertentu seperti melakukan penyelidikan terhadap penyelewengan keuangan negara (korupsi) di wilayah hukum Kabupaten Pelalawan serta melakukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, Pengamanan peredaran barang cetakan, Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bidang Pidana Umum

Bidang pidana umum berfungsi melakukan penanganan perkara terhadap perkara Tindak Pidana Umum lainnya yang sering dilakukan dimasyarakat dan melakukan penuntutan di persidangan.

4. Bidang Pidana Khusus

Bidang pidana khusus berfungsi melakukan tahap penyidikan terhadap suatu perkara tindak pidana tertentu seperti melakukan penyidikan terhadap penyelewengan keuangan negara (korupsi) di wilayah hukum Kabupaten Pelalawan.

5. Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasak husus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

6. Bidang Barang Bukti dan Barang Rampasan

Di bidang Barang Bukti dan Barang Rampasan merupakan bidang yang sudah di pisahkan dari Bidang Pidana Umum sejak tahun 2018, dan sekrang bidang ini berdiri sendiri tetapi juga tetap mengikuti bidang Pidana Umum dan tetap melaksanakan penetapan Pengadilan.

UIN SUSKA RIAU

D. Makna Logo



1. Bintang Sudut Tiga

Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

2. Pedang

Senjata Pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran/kebathilan dan kejahatan.

3. Timbangan

Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang di peroleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

4. Padi dan Kapas

Padi dan Kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Seloka “Satya Adhi Wicaksana”

Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa.

6. Makna Tata Warna

a. Kuning

Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar/lukisan, keluhuran yang di jadikan cita-cita.

b. Hijau

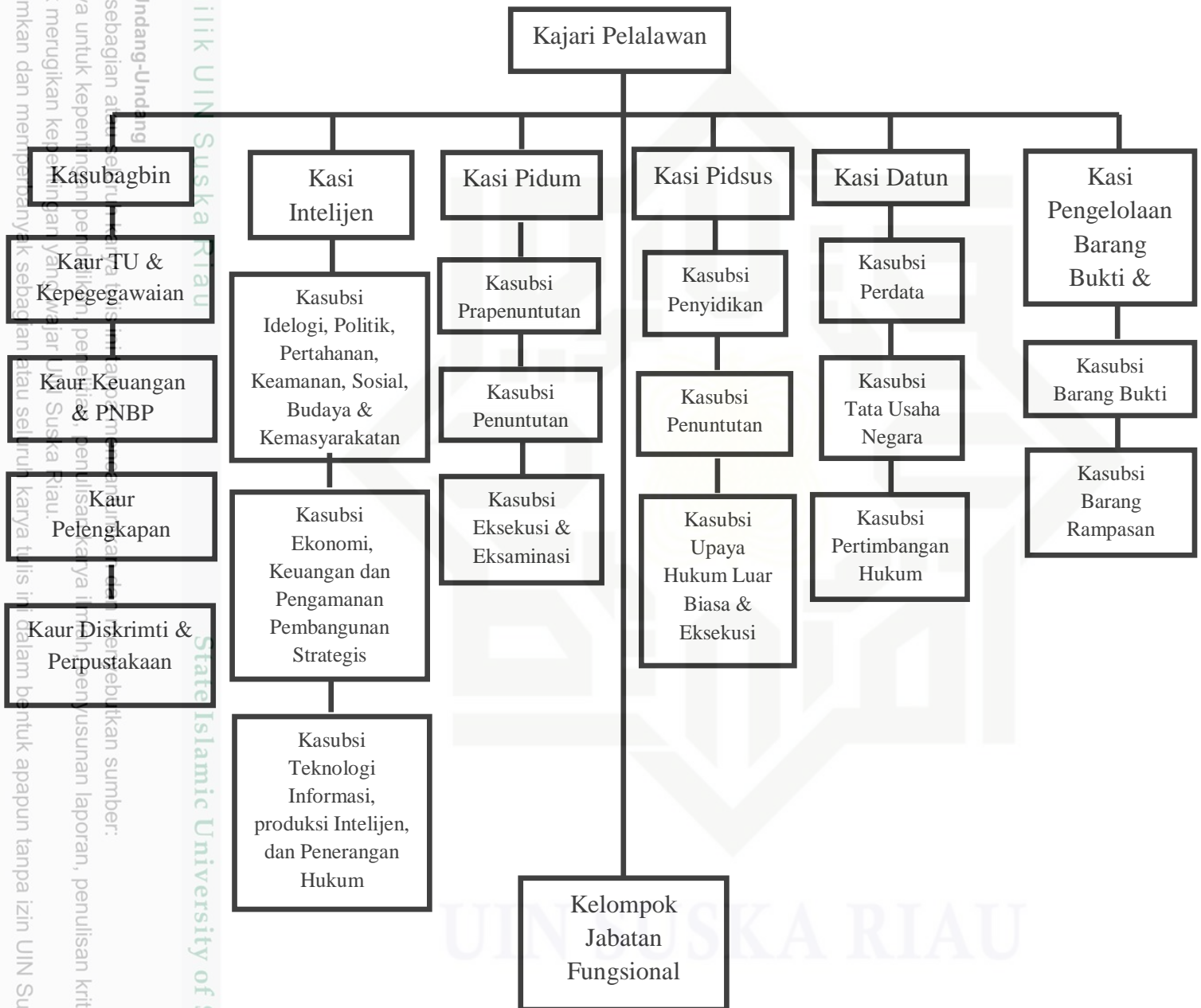
Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan Pengejaran/Pengraihan cita-cita.



E. Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Pelalawan

Bagan. II.1

Struktur Organisasi Kejaksaan Negeri Pelalawan





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KAJIAN PUSTAKA

A. Teori Peranan

Peranan menurut Poerwadarminta adalah “tindakan yang dilakukan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa” Berdasarkan pendapat diatas peranan adalah tindakan yang dilakukan orang atau sekelompok orang dalam suatu peristiwa, peranan merupakan perangkat tingkah laku yang diharapkan, dimiliki oleh orang atau seseorang yang berkedudukan di masyarakat. Kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan pengetahuan, keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain.²⁵

Menurut Soerjono Soekanto Pengertian Peranan adalah sebagai berikut:

Peranan merupakan aspek dinamis kedudukan (status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya maka ia menjalankan suatu peranan.²⁶

Konsep tentang peran (role) menurut komarudin dalam buku “Ensiklopedia Manajemen” mengungkap sebagai berikut :²⁷

- Bagian tugas utama yang harus dilakukan oleh manajemen.
- Pola perilaku yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
- Bagian suatu fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.

²⁵ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 1995), h.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Teori Peranan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), h. 243

²⁷ Komarudin, *Ensiklopedia Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 68



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

Peranan menurut Grass, Mason dan MC Eachen yang dikutip dalam buku pokok-pokok pikiran dalam sosiologi karangan David Bery mendefinisikan “Peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu. Namun, lain lagi pengertian peranan yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. ia mengatakan bahwa peranan (role) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.²⁸

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan dua (dua) variabel yang merupakan hubungan sebab akibat.

Menurut Soerjono Soekanto peranan mencakup tiga hal, yaitu :

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.

²⁸ Soerjono Soekanto, *Op.cit*, h. 245

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
3. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa setiap individu atau kelompok yang dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Pelalawan. Menjalankan peranan sesuai dengan norma-norma yang dihubungkan dengan posisi Kejaksaan Negeri Pelalawan dalam masyarakat, yang artinya menjalankan peranan berdasarkan peraturan-peraturan dalam proses untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Dalam hal ini penulis merujuk norma hukum berupa Undang-Undang, Peraturan Jaksa Agung, dan norma sosial yang apabila peranan ini dijalankan oleh Kejaksaan Negeri Pelalawan, maka akan tercipta suatu hubungan yang memunculkan nilai pelayanan antara Kejaksaan Negeri Pelalawan dengan masyarakat yang disebut dengan lingkaran sosial (*Social Circle*) yang diikuti dengan apa yang dapat dilakukan Kejaksaan Negeri Pelalawan di dalam masyarakat.

Menurut Soekanto pembahasan perihal aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat, penting bagi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Peranan harus dilekatkan pada Kejaksaan Negeri Pelalawan sebab masyarakat sudah menganggap Kejaksaan Negeri Pelalawan mampu melaksanakan tugasnya dengan maksimal.
- c. Dalam Kejaksaan Negeri Pelalawan kadangkala dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan arti kepentingan-kepentingan pribadi yang terlalu banyak.
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang yang seimbang.

Begitu pentingnya peranan sehingga dapat menentukan status kedudukan seseorang dalam pergaulan masyarakat. Posisi seseorang dalam masyarakat merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi instansi dan masyarakat. Hal inilah yang hendaknya kita pikirkan kembali, karena kecenderungan untuk lebih mementingkan kedudukan daripada peranan.²⁹

Aspek-aspek peranan menurut Biddle dan Thomas membagi peristilahan dalam teori peran dalam 4 (empat) golongan, yaitu:

1. Orang-orang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
2. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut.
3. Kedudukan orang-orang dalam perilaku.
4. Kaitan antara orang dan perilaku.

²⁹ Komarudin, *Op.cit*, h. 76



B. Teori Sistem Hukum

Kata “sistem” berasal dari kata ‘*systema*’ yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian.”³⁰ Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum.³¹ Sistem atau *systema* dalam *The New Webster International Dictionary* tahun 1980 diartikan sesuatu yang terorganisasi, suatu keseluruhan dan kompleks, tidak perlu dipertentangkan perbedaan antara sistem dan sub sistem, sebab sub sistem adalah bagian dari sistem itu sendiri. Sistem mengandung arti terhimpunnya bagian atau komponen yang saling berhubungan secara beraturan dan merupakan suatu keseluruhan.

Sistem itu sendiri telah dikompilasi dalam berbagai pendapat, antara lain: Ludwig Von Bertalanffy mengatakan sistem yang kompleks dari interaksi elemen-elemen (*system are complexes of element standing in interaction*). A.D. Hall dan R.E. Fagen mengatakan sistem adalah sekumpulan objek dan atribut yang berkerja secara bersama-sama (*a system is a set of objects together with relationship between the objects and between the attributes*). Kennet Berrien mengatakan sistem adalah seperangkat komponen yang berinteraksi satu sama lain, (*a system is a set of component, interacting with each other*). Richard A.

³⁰ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), h. 4

³¹ Salim, H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), h. 71.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Jhonson, Fremont E. Kast, dan James E. Resonweig mengatakan sistem memiliki komponen-komponen yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan rencana.³²

Sistem menurut R. Subekti adalah suatu susunan atau tatanan yang teratur, suatu keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain, tersusun menurut suatu rencana atau pola, hasil dari suatu pemikiran untuk mencapai suatu tujuan.³³ Sistem menurut Sudikno Mertokusumo adalah suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan.

Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan. J.H. Merryman, mengatakan, “*Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules*”, Artinya, dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukum pun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka peningkatan kesadaran hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen dalam hukum harus saling bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum.

³² Ade Maman Suherman, *Op.chit*, h. 4-5

³³ R. Subekti, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 169



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman digunakan untuk melihat peranan Kejaksaan dalam menyelenggarakan kegiatan di masa pandemi untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan pasal 30 ayat 3 huruf a Undang-Undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia pada Kejaksaan Negeri Pelalawan. Menurut Friedman, sistem hukum terdiri atas 3 (tiga) komponen, yaitu:

1. Komponen yang disebut dengan struktur. Ia adalah kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Administrasi yang mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum itu sendiri. Komponen struktur ini memungkinkan pemberian pelayanan dan penggarapan hukum secara teratur.
2. Komponen substansi yaitu berupa norma-norma hukum, baik itu peraturan-peraturan, keputusan-keputusan dan sebagainya yang semuanya dipergunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang mengatur.
3. Komponen hukum yang bersifat kultural. Ia terdiri dari ide-ide, sikap-sikap, harapan dan pendapat hukum. Kultur hukum ini dibedakan antara *Internal legal culture*, yakni kultur hukum Pengacara dan Hakim, dan *External legal culture* yakni kultur hukum masyarakat pada umumnya.³⁴

Ketiga komponen tersebut saling menentukan satu sama lainnya, demikian juga saling berpengaruh satu sama lainnya. Kelembagaan hukum adalah bagian

³⁴ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tatanusa, 2001), h. 9

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari struktur hukum seperti Kejaksaan Agung dan jajaran di bawahnya beserta aparaturnya. Seksi Intelijen sebagai struktur Kejaksaan memiliki peran yang penting di dalam meningkatkan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan kesadaran hukum masyarakat. Keberhasilan dan kegagalan dalam menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat oleh kemampuan dan kecakapan Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri di dalam menjalankan perannya. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu komponen substansi hukum. Komponen substansi ini dapat memberikan kepastian dan manfaat kepada masyarakat.

Terkait dengan budaya hukum ini, penyelenggaraan kegiatan kesadaran hukum masyarakat sesungguhnya merupakan upaya untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman hukum kepada masyarakat, hal ini sangat tergantung dengan nilai dan keyakinan masyarakat. Nilai dan keyakinan merupakan bagian dari budaya masyarakat. Jika masyarakat menilai dan berkeyakinan bahwa penyelenggaraan kegiatan kesadaran hukum masyarakat memberikan manfaat, maka tujuan penyelenggaraan kegiatan kesadaran hukum masyarakat akan tercapai.

C. Konsep Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat

Hukum sebagai sarana pengintegrasikan sosial, maka tidak akan mungkin bekerja dalam ruang hampa. Menurut Harry C. Bredemeier, ketika hukum bekerja



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

dalam sebuah tatanan sosial, maka ia akan selalu mendapatkan asupan dari bidang-bidang yang lain seperti ekonomi, politik dan budaya. Asupan yang diterima oleh hukum itu menjadi masukan (*Input*) dan keluaran (*Output*) yang dikembalikan ke dalam masyarakat.³⁵ Lebih lanjut Harry C. Bredemeier mengatakan, itulah sebabnya hukum dan realitasnya berfungsi sebagai faktor pengintegrasian masyarakat, maka hukum harus mampu menyelesaikan konflik secara tertib.

Pada prinsip nya proses pembuatan hukum berlangsung dalam empat tahapan besar, yakni tahap inisiasi, tahap socio-politis dan tahap juridis, dan tahap penyebarluasan atau desiminasi.³⁶ Pertama, tahap inisiasi merupakan tahap yang menandakan lahirnya atau munculnya suatu gagasan dalam masyarakat. Kedua, aktivitas yang berlangsung pada tahap socio-politis ini dimulai dengan mengolah, membicarakan (mendiskusikan), mengkritisi, mempertahankan gagasan awal yang berasal dari masyarakat melalui pertukaran pendapat antara berbagai golongan dan kekuatan dalam masyarakat. Ketiga, yakni tahap juridis merupakan tahap akhir di mana gagasan tersebut dijabarkan atau dirumuskan lebih lanjut secara lebih teknis menjadi ketentuan ketentuan hukum, termasuk menetapkan sanksi sakksi hukumnya. Tahap keempat adalah tahap desiminasi atau penyebarluasan, merupakan tahap sosialisasi sebuah produk hukum. Hasil akhir dari seluruh proses pembuatan hukum sebagaimana diuraikan di atas memiliki

³⁵ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-3, 1991), h. 143-158

³⁶ *Ibid*, h. 178

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

keterkaitan yang erat dengan tipologi masyarakat di mana hukum dibuat dan diberlakukan. Chambliss dan Seidman membuat perbedaan hukum menurut “tipologi masyarakat yang berbasis konsensus pada nilai-nilai”.³⁷ dengan “tipologi masyarakat yang berbasis konflik”.

Menurut Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, bahwa proses bekerjanya hukum sangat ditentukan oleh empat komponen utama, yakni lembaga pembuat hukum (undang-undang), birokrasi penegakan hukum, para pemegang peran, dan pengaruh kekuatan personal dan sosial. Tiga komponen yang pertama (lembaga pembuat hukum, birokrasi penegakan hukum, dan pemegang peran) itu berperan dalam koridor hukum, sedangkan kekuatan personal maupun sosial merupakan komponen “non-hukum”. Selanjutnya keempat komponen dapat diuraikan dalam proposisi-proposisi Robert B. Seidman, sebagai berikut:

Pertama, Setiap peraturan hukum menurut aturan-aturan, dan memerintahkan pemangku peran seharusnya bertindak dan bertingkah laku.

Kedua, Respon dan tindakan yang dilakukan oleh pemangku peran merupakan umpan balik dari fungsi suatu peraturan yang berlaku. Termasuk sanksi-sanksi yaitu kinerja dan kebijakan lembaga pelaksana/penetap peraturan dan lingkungan strategis (lingstra) yang mempengaruhinya.

Ketiga, Tindakan-tindakan yang diambil oleh lembaga-lembaga pelaksana peraturan sebagai respon terhadap peraturan hukum merupakan fungsi dari peraturan hukum yang berlaku beserta sanksi-sanksinya dan seluruh kekuatan

³⁷ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Penerbit Angkasa, 1979) h. 49-50



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam lingkungan strategi yang mempengaruhi dirinya, secara umpan balik sebagai respon dari pemangku peran atau yang dikenai peraturan hukum.

Keempat, Tindakan apa yang diambil oleh pembuat undang-undang, juga merupakan fungsi peraturan hukum yang berlaku, termasuk sanksi-sanksinya dan pengaruh seluruh kekuatan strategis terhadap dirinya, serta umpan balik yang datang dari para pemangku peran, pelaksana, dan penerap peraturan.

Empat proposisi di atas, secara jelas menggambarkan bagaimana bekerjanya suatu peraturan hukum dalam masyarakat. Teori Seidman ini dapat dipakai untuk mengkaji peraturan hukum yang dibuat oleh para elite negara, dan apakah bekerjanya hukum berfungsi sebagaimana mestinya dan efektif berlakunya dalam masyarakat, atau justru sebaliknya tidak efektif bekerjanya.

Hukum dapat bekerja dan berfungsi tidak sekedar apa yang diharapkan oleh pembuat peraturan hukum, tetapi perlu diteliti pada komponen elemen yang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Maksudnya tidak bekerja itu, bisa datang dari pembuat peraturan hukum, atau dari para penerap peraturan/pelaksana, ataukah dari pemangku peran. Selain itu dapat dikaji kendala-kendala eksternal global yang menyebabkan hukum tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Seperti ada tekanan-tekanan dari pihak luar negeri yang tergabung dalam organisasi internasional.

Basis bekerjanya hukum dalam masyarakat, maka hukum akan dipengaruhi oleh faktor-faktor atau kekuatan sosial mulai dari tahap perbuatan sampai dengan pemberlakuan. Kekuatan sosial akan berusaha masuk dalam setiap

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses legislasi secara efektif dan efisien. Peraturan hukum dikeluarkan dan diharapkan sesuai dengan keinginan, tetapi efek dari peraturan tersebut tergantung dari kekuatan sosial seperti budaya hukumnya baik, maka hukum akan bekerja dengan baik pula, tetapi sebaliknya apabila kekuatan hukum berkurang atau tidak ada, maka hukum tidak akan bisa berjalan karena masyarakat sebagai basis bekerjanya hukum.

Konsep bekerjanya hukum dalam masyarakat menurut Seidman terungkap dari dalil-dalil sebagai berikut :

- 1) Setiap peraturan hukum memberitahu tentang bagaimana seseorang pemegang peranan (*role occupant*) itu diharapkan bertindak.
- 2) Bagaimana seseorang pemegang peranan itu akan bertindak sebagai respons peraturan hukum merupakan fungsi peraturan-peraturan yang ditujukan kepadanya, sanksi-sanksinya, aktivitas dari lembaga-lembaga pelaksana serta keseluruhan kompleks sosial. Politik dan lain-lain.
- 3) Bagaimana lembaga-lembaga pelaksana itu akan bertindak sebagai respons terhadap peraturan yang mana merupakan fungsi peraturan-peraturan hukum yang ditujukan kepada mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan balik yang datang dari para pemegang peranan.
- 4) Bagaimana para pembuat Undang-Undang itu akan bertindak yang mana merupakan fungsi peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku mereka, sanksi-sanksinya, keseluruhan kompleks kekuatan-kekuatan sosial, politik,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ideologis dan lain-lainnya yang mengenai diri mereka serta umpan-umpan balik yang datang dari pemegang peranan serta birokrasi.

Sesuai dengan fokus penelitian ini, maka pemegang peranan adalah Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pelalawan sebagai organisasi kenegaraan (birokrasi) diarahkan untuk mencapai tujuan negara, tujuan hukum, dan tujuan sosial. Mengenai hal ini Peter M. Blau dan Marshall M. Meyer menyatakan bahwa kini dalam masyarakat kontemporer birokrasi telah menjadi suatu lembaga yang menonjol, sebagai lembaga negara yang melambangkan era modern, dan kita tidak mungkin memahami kehidupan sosial masa kini kalau kita tidak mengerti tentang bentuk lembaga ini.³⁸

Menurut Soerjono Soekanto, bahwa birokrasi merupakan ciri khas dalam penegakan hukum masyarakat modern, sehingga diciptakanlah diferensiasi ke dalam fungsi-fungsi serta penetapan tugas-tugas yang harus dijalankan berdasarkan peraturan hukum, untuk mencapai tingkat nasional secara maksimal sebagai dasar untuk menetapkan pekerjaan yang dilaksanakan secara efisien dan sistematis.³⁹

Dalam konteks Negara Hukum Indonesia, elemen-elemen di dalam konsep bekerjanya hukum dalam masyarakat di atas, merupakan mata rantai yang tidak

³⁸ Peter M. Blau dan Marshall M. Meyer, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, (Jakarta: UI Press, 1987), h. 14

³⁹ Soerjono Soekanto, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, (Jakarta: Bina Aksara, 2005), h. 13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpisahkan untuk melaksanakan dan mengefektifkan peraturan hukum agar mampu memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum bagi warga masyarakat. Efektifitas hukum menurut Satjipto Raharjo dipengaruhi oleh 5 (lima) faktor utama, yaitu:

- 1) Sumber daya Peraturan Perundang-undangan berkorelasi dengan peryaratan hukum yang baik secara yuridis, sosiologis, filosofis, politis, dan teknis.
- 2) Sumber daya manusia penegakan hukum menyangkut kesiapan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di jajaran institusi penegakan hukum.
- 3) Sumber daya fisik penegakan hukum berkenaan dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk melaksanakan penegakan hukum.
- 4) Sumber daya keuangan yaitu anggaran yang harus dipersiapkan untuk membiayai personil, sarana dan prasarana penegakan hukum.
- 5) Sumber daya pendukung lainnya seperti kesadaran warga masyarakat dan pra kondisi yang perlu dipersiapkan untuk mengefektifkan penegakan hukum.⁴⁰

D. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Kesadaran hukum menekankan tentang nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum di dalam masyarakat.

⁴⁰ *Ibid*, h, 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim

Kesadaran hukum merupakan konsepsi abstrak di dalam diri manusia tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, pembentukan hukum, dan efektivitas hukum. Kesadaran hukum merupakan kesadaran nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada.

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insyaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsyafi, merasai. Kesadaran berarti keinsyafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsyafan, keadaan seseorang yang mengerti betul apa itu hukum, fungsi dan peranan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya.

Kesadaran hukum itu berarti juga kesadaran tentang hukum, kesadaran bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia yang menyadari bahwa manusia mempunyai banyak kepentingan yang memerlukan perlindungan hukum. Jadi kesadaran hukum tidak lain merupakan pandangan-pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa hukum itu. Pandangan-pandangan hidup dalam masyarakat bukanlah semata-mata hanya merupakan produk dari pertimbangan-pertimbangan menurut akal saja, akan tetapi berkembang di bawah pengaruh beberapa faktor seperti agama, ekonomi, politik, sosial, dan budaya.

Di dalam diri setiap manusia maupun kelompok manusia, biasanya terdapat ide-ide tertentu tentang apa yang diinginkan dan apa yang sebaiknya di jauhi. Ide-ide tersebut merupakan konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manusia, yang secara *socio psychologist* terbentuk atas dasar pengalaman-pengalaman yang diperoleh manusia di dalam pergaulan hidup. Sudah tentu, bahwa pengalaman-pengalaman tersebut terlebih dahulu mengalami semacam seleksi, atas dasar unsur-unsur mental yang terdapat di dalam diri manusia. Hal itu semuanya, antara lain mengakibatkan bahwa manusia kemudian memberikan ukuran-ukuran tadi adalah kaidah-kaidah atau norma-norma.

Manusia mempunyai konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang diinginkannya dan apa yang ditolaknya, yang kesemuanya itu dinamakan nilai (*value*). Di dalam nilai-nilai tersebut tercakup cita-cita untuk hidup teratur. Hal mana dapat mencakup berbagai bidang kehidupan seperti bidang ekonomi, politik dan juga sosial. Di dalam cita-cita demikianlah terumuskan konsepsi kesadaran hukum, yaitu suatu nilai yang menginginkan keserasian antara ketertiban dengan kebebasan.⁴¹

Apabila seseorang berbicara mengenai kesadaran hukum, maka tidak jarang bahwa dia sendiri kurang mengetahui dengan tepat, apa yang dimaksudkannya dengan kesadaran hukum tersebut. Ada kalanya hal itu dikaitkan dengan perasaan seseorang terhadap hukum, misalnya rasa keadilan. Kadang-kadang kesadaran hukum dikaitkan dengan masalah puas atau rasa tidak puas terhadap hukum yang ada. Tidak jarang pula kesadaran hukum itu dihubungkan

⁴¹ Soerjono Soekanto & Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), h. 222-223

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan perilaku orang, artinya kalau perilakunya menyimpang dari hukum, maka tingkat kesadaran hukumnya rendah dan demikian pula sebaliknya.

Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai yang hidup dalam masyarakat dalam bentuk pemahaman dan ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembinaan kesadaran hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum diarahkan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan hukum serta hak-hak dan kewajiban yang diaturnya dan menjadikan masyarakat hukum taat serta patuh kepada hukum berdasarkan kesadaran hukum yang tinggi, menempuh berbagai cara dan mekanisme dalam mengkomunikasikan pesan penyuluhan hukum disesuaikan dengan kebutuhan dan stratifikasi masyarakat kita yang sangat majemuk sifatnya.

Para ilmuwan berpendapat, bahwa tempat dari kesadaran hukum adalah sebagai perantara atau mediator antara hukum dengan perilaku manusia. Hukum, baik sebagai kaidah maupun perilaku yang baik atau unik, mempunyai tujuan agar kehidupan manusia dalam masyarakat, berlangsung dalam keadaan damai. Ide tentang kesadaran warga-warga masyarakat sebagai dasar sahnya hukum positif tertulis diketemukan di dalam ajaran-ajaran tentang *rechtsgefühl* atau *rechtsbewusstsein* yang intinya adalah bahwa tak ada hukum yang mengikat warga-warga masyarakat kecuali atas dasar kesadaran hukumnya.⁴² Alangkah banyaknya pendapat orang tentang kesadaran hukum, yang juga diketemukan

⁴² Soejono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001) h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Repelita II bab 27. Aneka macam pendapat tersebut kemudian dipergunakan untuk mengukur tinggi-rendahnya kesadaran hukum warga-warga masyarakat atau mungkin juga ada tidaknya kesadaran hukum tersebut pada bahagian tertentu dari suatu masyarakat.

Menurut Scholten sebagai mana yang dikutip oleh Abdurrahman, bahwa “Kesadaran hukum itu adalah tidak lain dari pada suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat kepada hukum”. Tidak jauh dengan apa yang disimpulkan Scholten, dari simposium kesadaran hukum masyarakat dalam masa transisi memberikan batasan bahwa pengertian kesadaran hukum itu meliputi pengetahuan tentang hukum, penghayatan terhadap hukum, dan ketaatan terhadap hukum.⁴³

Kesadaran hukum masyarakat adalah nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat tentang hukum, yang meliputi pengetahuan, pemahaman, penghayatan, kepatuhan/ ketaatan kepada hukum. Dengan demikian kesadaran hukum itu sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Di sini penekanan adalah nilai-nilai masyarakat tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat. Jadi nilai-nilai itu merupakan konsepsi mengenai hal yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. Dan sederhana nilai-nilai tersebut pada hakikatnya didasarkan pada rasa susila

⁴³ O.K. Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), h. 106



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan rasa keadilan dari manusia yang melakukan hubungan timbal balik (*social interaction*).

Di dalam ilmu hukum, adakalanya dibedakan antara kesadaran hukum dengan perasaan hukum. Perasaan hukum diartikan sebagai penilaian hukum yang timbul secara serta merta dari masyarakat. Kesadaran hukum lebih banyak merupakan perumusan dari kalangan hukum mengenai penilaian tersebut, yang telah dilakukannya melalui penafsiran-penafsiran secara ilmiah.

Sebelum mengemukakan pendapatnya tentang kesadaran hukum, Paul Scholten terlebih dahulu mengadakan ulasan terhadap konsepsi kesadaran hukum yang diajukan oleh Krabbe. Menurut Paul Scholten, maka dengan kesadaran hukum dimaksudkan sebagai suatu kesadaran yang terdapat di dalam diri setiap manusia mengenai hukum yang ada atau perihal hukum yang diharapkan, sehingga ada kemampuan untuk membedakan antara hukum yang baik dengan hukum yang buruk. Jadi, pengertian kesadaran hukum sama sekali tidak menunjuk pada suatu penilaian hukum yang dilakukan terhadap suatu kejadian yang konkret. Jadi, kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan demikian, maka dapatlah dikatakan bahwa persoalannya di sini kembali pada masalah dasar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daripada sahnya hukum yang berlaku, yang akhirnya harus dikembalikan pada nilai-nilai masyarakat.

Ajaran-ajaran kesadaran hukum lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia baik secara individual maupun kolektif. Oleh karena, kesadaran hukum banyak sekali berkaitan dengan aspek-aspek kognitif dan perasaan yang seringkali dianggap sebagai faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara hukum dengan pola-pola perilaku manusia dalam masyarakat.

Setiap masyarakat senantiasa mempunyai kebutuhan-kebutuhan utama atau dasar dan para warga masyarakat menetapkan pengalaman-pengalaman tentang faktor-faktor yang mendukung dan yang mungkin menghalang-halangi usahanya untuk memenuhi kebutuhan utama atau dasar tersebut. Apabila faktor-faktor tersebut dikonsolidasikan, maka terciptalah sistem nilai-nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi atau patokan-patokan abstrak tentang apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk.

Sistem nilai yang mencakup konsepsi-konsepsi antara lain sebagai berikut:

- 1) Merupakan abstraksi dari pada pengalaman-pengalaman pribadi, sebagai akibat dari proses interaksi sosial yang terus-menerus.
- 2) Senantiasa harus diisi dan bersifat dinamis, oleh karena didasarkan pada interaksi sosial yang dinamis pula.
- 3) Merupakan suatu kriteria untuk memilih tujuan-tujuan didalam kehidupan sosial.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Merupakan suatu yang menjadi penggerak manusia ke arah pemenuhan hasrat hidupnya, sehingga nilai-nilai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pengarahan kehidupan sosial maupun kehidupan manusia.⁴⁴

Dari keempat tahapan di atas, terbentuknya pola perilaku hukum merupakan derajat kesadaran hukum yang sangat tinggi. Pola perilaku hukum merupakan hal utama dalam kesadaran hukum, karena melalui pola perilaku utama inilah dapat dilihat apakah suatu peraturan hukum itu berlaku secara efektif atau tidak di dalam masyarakat. Tingginya derajat kesadaran hukum mengakibatkan warga masyarakat mentaati ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya rendahnya derajat kesadaran hukum mengakibatkan kepatuhan terhadap hukum juga akan rendah.

Dalam kaitannya dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan, maka kesadaran hukum pada dasarnya merupakan variabel penghubung antara keharusan yang terdapat di dalam isi peraturan dengan perilaku warga masyarakat yang diatur oleh hukum tersebut. Oleh karena itu berhasil tidaknya undang-undang mengatur perilaku warga masyarakat akan tergantung kepada tingkat kesadaran hukum dari warga masyarakat tersebut.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), h. 146



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peranan Kejaksaan dalam menyelenggarakan kegiatan di masa pandemi untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pelalawan, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peranan Kejaksaan dalam menyelenggarakan kegiatan di masa pandemi untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pelalawan dalam kenyataan masih belum berjalan secara maksimal. Hal ini disebabkan karena frekuensi penyuluhan hukum dan penerangan hukum yang dilaksanakan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pelalawan tidaklah sebanding dalam per triwulan yang yang menjadi bahan laporan setiap 3 (tiga) bulan sekali dilaksanakan program peningkatan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Kabupaten Pelalawan. Di samping itu, tolak ukur berhasil atau tidaknya kegiatan peningkatan kesadaran hukum yang dilaksanakan oleh Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Pelalawan bagi masyarakat dapat dilihat dari jumlah tindak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pidana yang masuk ke Kejaksaan Negeri Pelalawan yang setiap bulannya mengalami peningkatan dan hanya beberapa bulan saja yang turun.

2. Adapun kendala-kendala yang menghambat peranan Kejaksaan dalam menyelenggarakan kegiatan di masa pandemi untuk peningkatan kesadaran hukum masyarakat berdasarkan pasal 30 ayat (3) huruf a Undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia di Kejaksaan Negeri Pelalawan adalah sebagai berikut :

- a. Faktor adanya Covid-19.
- b. Terkendalanya jaringan.
- c. Terbatasnya waktu untuk menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
- d. Stigma masyarakat terhadap kejaksaan.

B. Saran

Agar pelaksanaan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat di Kejaksaan Negeri Pelalawan berjalan lebih baik lagi, penulis mempunyai beberapa saran :

1. Membangun kedekatan terlebih utama kepada masyarakat dan meyakinkan kalau Kejaksaan siap sedia melayani masyarakat kapanpun di butuhkan dan dimintai pendapat terkait tentang konsultasi di bidang hukum khususnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Melibatkan seluruh personil kejaksaan baik jaksa, pegawai, maupun honorer Kejaksaan untuk ikut serta dalam kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat agar kegiatan terlaksana dengan maksimal dan optimal.
3. Jika terhambat dikarenakan tidak bisa mengumpulkan orang banyak dan juga terhambat ketika kegiatan di laksanakan secara online atau daring, hendaknya Kejaksaan Negeri Pelalawan khususnya Kepala Seksi Intelijen membuat layanan online yang bisa di akses oleh masyarakat dan membuat pos pelayanan khusus untuk masyarakat jika mereka tidak berani datang ke kejaksaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku/ Jurnal/ Penelitian

- Ali Zainudin, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ahmad Beni Saebani, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Pustaka Setia
- Ashofa Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta
- Chairuddin O.K, 1991, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika
- El-Muhtaj Majda, 2009, *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana, Cet. Ke-3
- Fathoni Abdurrahman, 2011, *Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Gunawan Ilham, 1994, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum Dan Stabilitas Politik*, Jakarta : Sinar Grafika
- H.S. Salim, 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajawali Press
- Komarudin, 1994, *Ensiklopedia Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara
- Maman ade Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masa
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- M. Friedman Lawrence diterjemahka oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Jakarta: Tatanusa
- Poerwadarminta, 1995, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Balau Pustaka
- Prakoso Djoko, 1989, *Tugas-tugas Kejaksaan Dibidang Non Yustisal*, Jakarta : Bina Aksara
- Peter M. Blau dan Marshall M. Meyer, 1987, *Birokrasi Dalam Masyarakat Modern*, Jakarta: UI Press
- Rahardjo Satjipto, 1979, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Penerbit Angkasa
- _____, 1991, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-3
- _____, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya
- _____, 2005, *Pendekatan Sosiologi Terhadap Hukum*, Jakarta: Bina Aksara
- Soekanto Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2007),
- _____, 1982, *Sosiologi Hukum dan Masyarakat*, Jakarta: CV. Rajawali
- _____, 1994, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- _____, 2001, *Hukum Adat Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subagyo Joko, 2011, *Metode penelitian dalam teori dan praktik*, Jakarta:

Rineka Cipta, jilid 1

Supriadi, 2010, *Etika dan tanggung Jawab Profesi hukum di Indonesia*,

Jakarta: Sinar Grafika

Subekti, R., 1999, *Rangkuman Inti Sari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya

Bakti

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 30

Peraturan Jaksa Agung No: 011/A/JA/01/2010 tentang Rencana Strategis

Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2010-2014 tanggal 28 Januari

2010.

Keputusan Jaksa Agung RI Nomor : KEP-015/JA/3/1995 tanggal 22 Maret

1995 tentang Pelaksanaan Penyuluhan Hukum dan Penerangan Hukum

Program Pembinaan Masyarakat Taat Hukum sebagaimana yang di

ubah dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor : KEP-001/JA/01/2006

tanggal 2 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Penerangan dan

Penyuluhan Hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul *“PERANAN KEJAKSAAN DALAM MENYELENGGARAKAN KEGIATAN DI MASA PANDEMI UNTUK PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT BERDASARKAN PASAL 30 AYAT (3) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DI KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN”* yang ditulis oleh :

Nama : **M RIZKY MAULANA**
NIM : 11720714702
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah dimunaqasahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 09 Juni 2021
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Daring/Online

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sutan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 21 Juni 2021 M
TIM PENGUJI MUNAQASAH

Ketua
Firdaus, SH., MH.

Sekretaris
Rudiadi, SH., MH.

Penguji I
Muslim, S.Ag, SH, M.Hum.

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, SH., MH

Mengetahui:
Kasubbag Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag.
NIP. 19750801 200701 1 023

.....
.....
.....
.....

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul PERANAN KEJAKSAAN DALAM MENYELENGGARAKAN KEGIATAN DI MASA PANDEMI UNTUK PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT BERDASARKAN PASAL 30 AYAT (3) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
DI KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN.

Nama : M. RIZKY MAULANA

NIM : 11720714702

Program Studi : ILMU HUKUM

Diseminarkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 24 NOVEMBER 2020

Narasumber : ILHAM AKBAR, SH., MH

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru,
Narasumber

Jalinus, S.Ag.

NIP. 19750801 200701 1 023

ILHAM AKBAR, SH., MH
NIP. 130217090

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Mengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Mengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.1/PP.00.9/6858/2020
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 02 Desember 2020

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: M. RIZKY MAULANA
NIM	: 11720714702
Jurusan	: Ilmu Hukum S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: PERANAN KEJAKSAAN DALAM MENYELENGGARAKAN KEGIATAN DI MASA
PANDEMI UNTUK PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT
BERDASARKAN PASAL 30 AYAT 3 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DI KEJAKSAAN
NEGERI PELALAWAN

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/38013
TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6858/2020 Tanggal 2 Desember 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

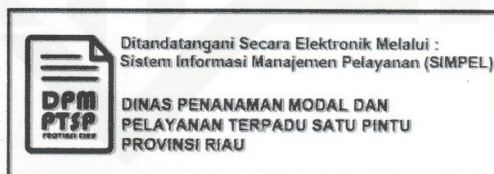
- | | | |
|----------------------|---|--|
| 1. Nama | : | M. RIZKY MAULANA |
| 2. NIM / KTP | : | 11720714702 |
| 3. Program Studi | : | ILMU HUKUM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | PERANAN KEJAKSAAN DALAM MENYELENGGARAKAN KEGIATAN DI MASA PANDEMI UNTUK PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT BERDASARKAN PASAL 30 AYAT 3 HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DI KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : | KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 25 Januari 2021



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Pelalawan
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Pangkalankerinci
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI RIAU

KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN

Jalan Hangtuh No.03 Desa Makmur SP.VI
Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan 28314
Website : //www.kejari.pelalawan.kejaksaan.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : Print- /L.4.19/Cp.1/02/2021

Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan dengan ini menerangkan

Nama : M RIZKY MAULANA
NIM : 11720714702
Program Studi : ILMU HUKUM (S.1)
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM

Bahwa yang bersangkutan benar telah melakukan penelitian dan pengumpulan data sehubungan dengan penelitian yang berjudul **"PERANAN KEJAKSAAN DALAM MENYELENGGARAKAN KEGIATAN DI MASA PANDEMI UNTUK PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT BERDASARAKAN PASAL 30 AYAT (3) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DI KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN"**.

Demikian surat keterangan ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Kerinci, 08 Februari 2021

Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan

NOPHY TENNOPHERO SUOTH, S.H., M.H.

Jaksa Madya / NIP. 19751110 200112 1 006

UIN SUSKA RIAU



SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : M RIZKY MAULANA
 NIM : 11720714702
 Tempat / Tanggal Lahir : Tanjung Pura / 06 Agustus 1999
 Program Studi : Ilmu Hukum
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul **“Peranan Kejaksaan Dalam Menyelenggarakan Kegiatan Di Masa Pandemi Untuk Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Berdasarkan Pasal 30 Ayat (3) Huruf A Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Di Kejaksaan Negeri Pelalawan”**, adalah benar karya saya sendiri atau bukan plagiat dari hasil karya orang lain.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan karya saya sendiri atau plagiat hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 21 Juni 2021

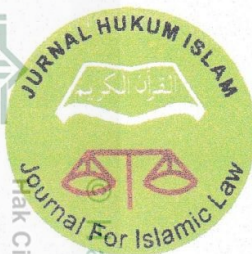
Yang Membuat Pernyataan



M RIZKY MAULANA

NIM. 11720714702

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : M RIZKY MAULANA
NIM : 11720714702
JURUSAN : ILMU HUKUM
JUDUL : PERANAN KEJAKSAAN DALAM MENYELENGGARAKAN KEGIATAN DI MASA PANDEMI UNTUK PENINGKATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT BERDASARKAN PASAL 30 AYAT (3) HURUF A UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DI KEJAKSAAN NEGERI PELALAWAN

Pembimbing: Moh. Kastulani, S.H., M.H

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 21 Juni 2021

Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.

NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Tanjung Pura yang terletak di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatra Utara, pada tanggal 06 Agustus 1999 dari pasangan suami istri Bapak Aminurrisal dengan Ibu Eliana yang diberi nama **"M RIZKY MAULANA"** yang merupakan anak Ketiga dari empat bersaudara. Riwayat pendidikan penulis, pada tahun 2011 penulis lulus dari Sekolah Dasar 009 Kuala Kecamatan Pangkalan Kerinci. Pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan di MTS Negeri Pangkalan Kerinci, dan pada tahun 2017 penulis lulus dari Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Bernas Kabupaten Pelalawan.

Pada tahun 2017 penulis melanjutkan pendidikannya di salah satu Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Ilmu Hukum. Selama menjadi mahasiswa UIN SUSKA RIAU, penulis juga mengikuti organisasi KSR Palang Merah Indonesia (PMI) Unit UIN SUSKA RIAU sebagai anggota Sumber Daya Manusia dan Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Ilmu Hukum Sebagai Ketua selama periode 2019-2020.

Selanjutnya pada tahun 2019 penulis melakukan kegiatan magang di Kejaksaan Negeri Pelalawan. Setelah itu, penulis melanjutkan Kuliah Kerja Nyata Daring (KKN DR) di Desa Sering, Kecamatan Pelalawan Kabupaten Pelalawan. Pada tanggal 09 Juni 2021 penulis dinyatakan lulus dengan judul skripsi "Peranan Kejaksaan Dalam Menyelenggarakan Kegiatan Di Masa Pandemi Untuk Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Huruf A Undng-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Di Kejaksaan Negeri Pelalawan" dengan prediket sangat memuaskan.